Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana

Analysis of Criminal Formulation Problems in Criminal Law

Rajin Sitepu*

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: rajinsitepu@uinsu.ac.id

Diterima: November 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Mei 2019

Abstrak

Hukum Pidana selama ini telah luput dari perhatian sehingga mendorong dibahasnya masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas menyangkut masalah perumusan pidana pokok mati-penjara-kurungan-denda dan pola perumusannya tunggal-alternatif-kumulatif-gabungan alternatif kumulatif dan minimum-maksimum dan mengenai asas keselarasan antara berat-ringannya pidana dengan berat-ringannya kejahatan atau pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan melakukan menganalisis hanya dari bahan pustaka saja. Hasil dan pembahasan diketahui bahwa pada dasarnya pidana pokok mati-penjara-kurungan-denda yang dirumuskan dalam hukum pidana itu telah selaras dan serasi dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggaran. Meskipun demikian, masih ada ditemukan dalam KUHP masalah pidana ringan, yakni pidana denda diancamkan sebagai pidana utama bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat kejahatan. Selain itu, penerapan pidana denda yang besaran nilai denda yang dirumuskan saat sekarang ini sudah usang, sudah tidak sesuai, dan sudah tidak realistis untuk dijatuhkan.

Kata kunci: Perumusan Pidana, Pidana Pokok, Hukum Pidana

Abstract

The Criminal Law now has escaped from the attention, which has encouraged the discussion of this issue. The purpose of this study is to discuss the problem of formulation of basic sentence of death-prison-penalties and the patterns of formulation of a single-alternative-cumulative-combination of cumulative and minimum-maximum alternatives and regarding the principle of harmony between the severity of a crime and the severity of a violation. The research method used is normative juridical research originating from secondary data by analyzing only from library material. The results and discussion are known that basically of the death penalty-prison punishment-fines-imprisonment formulated in the criminal law has been harmony with the weight and severity of the crime or violation. Nonetheless, there are still found in the Criminal Code of the minor criminal problem, that is, criminal penalties are threatened as the main criminal offense that is categorized as a serious crime. In addition, the imposition of criminal penalties for the amount of the fine that was formulated at this time was outdated, was not appropriate, and was not realistic to be dropped

Keywords: Criminal Formulation, Criminal principal, Criminal Law

How to cite: Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana Dalam Hukum Pidana. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (1): 83-98

PENDAHULUAN

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh pelaku telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada pembuatnya karena telah melanggar hukum pidana. Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya refresif yang kuat, berupa tindakan-tindakan pengamanan. (Jur Andi Hamzah, 2012)

Selama ini, masalah perumusan pidana sepertinya telah luput dari perhatian. Pidana itu dirumuskan dalam hukum pidana, tidak pernah dipersoalkan, apakah telah dirumuskan secara baik atau tidak. Bahkan ada kaedah dalam merumuskan pidana itu atau tidak, walaupun kaedah itu ada, hal itu selama ini telah luput dari perhatian. Yang menjadi perhatian selama ini dalam hukum pidana adalah menyangkut masalah pelaku, pertanggungjawaban, dan pidana, yang kesemuanya itu dipandang sebagai sesuatu yang sudah pakem, sudah semestinya, sudah benar dan baik, sudah adil, sehingga siap untuk dipakai dan diterapkan. Tidak dipersoalkan lagi apakah kesemuanya itu sudah baik atau tidak.

Masalah perumusan pidana itu, yang selama ini sudah dianggap siap untuk dipakai dan diterapkan. Perumusan pidana yang dimaksud adalah yang terdapat dalam KUHP (kodifikasi) maupun yang tersebar di luar KUHP. Adapun yang dimaksud dengan pengertian perumusan pidana di sini dibatasi sehingga hanya menyangkut beberapa aspek saja, yakni perumusan pidana pokok: mati-penjara-kurungan-denda dan pola perumusan pidana: tunggal-alternatif-kumulatif-gabungan alternatif-kumulatif dan pola perumusan pidana: maksimum-minimum umum dan maksimum-minimum khusus

Merumuskan pidana itu secara baik dan benar, mendapatkan perhatian yang cukup pada masa-masa yang akan datang. Dengan perhatian yang cukup diharapkan ke depan, kita akan memiliki kaedah-kaedah dalam merumuskan pidana, kalau saat ini kaedah-kaedah itu ternyata belum ada, walaupun kaedah-kaedah itu sudah ada, maka ke depan kaedah-kaedah tersebut perlu mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah merumuskan pidana itu, ke depan diharapkan akan lahir ahli hukum pidana yang lebih mumpuni, yang tidak saja mampu menerapkan hukum pidana secara

baik (keterampilan aplikasi) akan tetapi juga mampu untuk memformulasikan hukum pidana secara baik, khususnya dalam merumuskan pidananya (keterampilan formulasi). Akhirnya melalui hal tersebut, ke depan kita tentu bisa berharap akan lahir atau akan dihasilkan perumusan pidana yang baik dan benar dalam hukum pidana kita, baik yang bersumber dari KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

Tulisan ini, akan digambarkan untuk kejahatan atau pelanggaran apa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda diancam. Bilamana atau dalam hal apa pidana-pidana pokok tersebut dirumuskan dengan pola tunggal, alternatif, kumulatif, atau gabungan alternatif-kumulatif, jenis-jenis pidana apa, pola perumusan pidana itu memakai pola maksimum-minimum umum dan pola maksimum-minimum khusus dan asas keselarasan antara berat-ringannya pidana dengan berat-ringannya kejahatan atau pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian normatif. Deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dalam perumusan pidana dalam hukum

pidana, menganalisis dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan member saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Data penelitian jenis hukum normatif, (Soejono Soekanto. 2015) ini berupa data dasar atau data pokok yang dalam penelitian digolongkan sebagai data skunder, yang terdiri dari:

Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi penelitian, buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan.

Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti internet.

Alat atau teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder

berupa buku-buku, artikel-artikel, maupun yang diambil dari internet, dokumen-dokumen pemerintahan, dan termasuk peraturan perundang-undangan.

Analisis data setelah yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Secara sederhana analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait objek penelitian ini dari masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Pidana Pokok dan Pola Perumusannya Tunggal, Alternatif, Kumulatif, Gabungan Alternatif Kumulatif dan Minimum-Maksimum

Pidana dan tindakan termasuk sanksi dalam hukum pidana. Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). (Jur Andi Hamzah, 2012) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu ada dalam empat jenis, yakni: pidana mati, pidana penjara (penjara seumur hidup dan penjara sementara selama-lamanya dua puluh

tahun), pidana kurungan, dan pidana denda (di luar KUHP juga hanya mengenal empat jenis pidana pokok ini, karena tidak ditemukan adanya jenis pidana pokok lainnya selain keempat jenis pidana pokok tersebut di luar KUHP).

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atas berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan yang akan digunakan. (Teguh Prasetyo, 2011)

Berikut ini akan digambarkan masing-masing jenis pidana pokok tersebut dirumuskan dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP dan dengan pola apa perumusannya:

Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang terberat dalam Hukum Pidana kita, di beberapa negara, pidana ini bahkan sudah dihapuskan. (Andi Hamzah, 1994) Pidana mati adalah pidana yang ditujukan terhadap hak hidup, yakni berupa perampasan atau pencabutan hak hidup. Cara menjalankannya di setiap negara berbeda-beda, di negara kita dilakukan

dengan cara ditembak oleh satu regu penembak.

Dijatuhkannya atau dapat dijatuhkannya pidana mati ini dalam praktik penegakan hukum, tentu tidak terlepas dari dirumuskannya pidana mati itu dalam Hukum Pidana. Artinya oleh karena adanya perumusan pidana mati atau oleh karena diancamnya suatu kejahatan tertentu dengan pidana mati lah maka pelaku kejahatan yang tertentu tersebut dapat dijatuhkan pidana mati, apabila pidana mati tersebut tidak dirumuskan pada kejahatan tertentu, maka pelaku kejahatan tertentu tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati.

Sebagai jenis pidana yang terberat, pidana mati ini dirumuskan terbatas, terbatas pada kejahatan-kejahatan (pelanggaran tidak) yang sangat berat. Oleh karena itu tidak banyak kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut yakni kejahatan terhadap Keamanan Negara, kejahatan terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang Bersahabat, kejahatan terhadap jiwa orang, pencurian disertai pembunuhan, pemerasan dan ancaman, kejahatan pelayaran, dan kejahatan tentang penerbangan dan kejahatan terhadap

sarana atau prasarana penerbangan. (Adami Chazawi, 2018)

Kemudian, ancaman pidana mati bagi pelanggar hukum pidana di luar KUHP, antara lain; kejahatan korupsi yakni korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), kejahatan terorisme (Pasal 6 dan 10A UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang), kejahatan Narkotika (Pasal 113 dan 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), kejahatan Psikotropika (Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), dan kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 36 dan 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Dilihat dari pola perumusannya (tunggal-alternatif-kumulatif-atau gabungan alternatif-kumulatif), pidana mati selalu dirumuskan dengan pola alternatif atau gabungan alternatif-kumulatif. Tidak pernah pidana mati itu dirumuskan secara tunggal. Perumusan

pidana mati secara alternatif atau secara gabungan alternatif-kumulatif maksudnya adalah pidana mati itu dirumuskan sebagai pidana utama yang diancamkan, yang dialternatifkan (biasanya dengan memakai kata “atau”) dengan jenis pidana lainnya yang lebih ringan (selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun). Sebagai contoh dari perumusan pidana mati secara alternatif atau gabungan alternatif-kumulatif ini dapat disebut misalnya yang ditentukan dalam Pasal 479k ayat (2) KUHP untuk perumusan pidana mati secara alternatif dan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 untuk perumusan pidana mati secara gabungan alternatif-kumulatif.

Pola perumusan lainnya, yakni dari aspek perumusan maksimum-minimum, bahwa pidana mati ini merupakan jenis pidana yang tidak ada batas maksimum-minimumnya, seperti pidana (*uqubah*) *had* dalam sistem Hukum Pidana Islam. Jadi berbeda dengan perumusan pidana lainnya seperti pidana penjara (kecuali penjara seumur hidup), pidana kurungan, dan pidana denda yang memiliki batas maksimum dan batas minimum, baik batas minimum umum maupun batas minimum khusus. (Ahmad Wardi Muslich, 2016)

Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang berada pada urutan kedua dalam urutan pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. (R. Soesilo, 1986). Sebagai jenis pidana yang berada di urutan kedua, pidana penjara berarti tidak seberat pidana mati, namun lebih berat dari pidana kurungan apalagi pidana denda. Pidana penjara adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni dengan membatasi kemerdekaan bergerak si terpidana. Ada dua macam pidana penjara ini, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (D. Schaffmeister, dkk, 2017)

Sebagai pidana yang membatasi kemerdekaan bergerak, maka dalam pidana penjara seumur hidup, kemerdekaan si terpidana itu dibatasi seumur hidupnya (sampai meninggal). Adapun dalam pidana penjara sementara, kemerdekaan si terpidana itu dibatasi sementara, selama-lamanya dua puluh tahun (dalam UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan pidana penjara sementara ini selama-lamanya sampai 25 tahun). Dari pengertian kedua macam pidana penjara tersebut, berarti pidana penjara seumur hidup lebih berat daripada pidana penjara

sementara. Oleh karena itu wajar kalau pidana penjara seumur hidup itu selalu menjadi alternatif dari pidana mati, pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun menjadi alternatif dari pidana penjara seumur hidup.

Sedangkan, jenis pidana penjara seumur hidup, yang urutannya di bawah pidana mati, maka jenis pidana ini juga tidak banyak ditemukan perumusannya dalam Hukum Pidana. Artinya tidak banyak kejahatan (pelanggaran tidak) yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Dari uraian di atas diketahui bahwa semua kejahatan yang diancam dengan pidana mati, diancam juga dengan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatifnya. Di samping itu, perumusan pidana penjara seumur hidup ditemukan pula dirumuskan sebagai pidana utama, alternatifnya adalah pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Artinya ditemukan sejumlah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, sebagai pidana utamanya, alternatifnya adalah pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup sebagai pidana utamanya itu antara lain; kejahatan terhadap Keamanan Negara

(Pasal 106, 107 ayat (2), 108 ayat (2), 110 ayat (1) dan (2), dan 124 ayat (2) KUHP, kejahatan terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan wakil Kepala Negara yang Bersahabat (Pasal 140 ayat (2) KUHP), kejahatan yang mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang (Pasal 187-3e, 194 ayat (2), 196-3e, 198-2e, 200-3e, 202 ayat (2), dan 204 ayat (2) KUHP; dan kejahatan terhadap jiwa (Pasal 339 KUHP).

Selanjutnya untuk pidana penjara sementara, bahwa jenis pidana ini banyak sekali dirumuskan dalam Hukum Pidana. Jenis pidana ini dirumuskan, di samping sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup sebagaimana telah disinggung di atas, dirumuskan pula sebagai pidana utama yang dialternatifkan dengan pidana kurungan atau pidana denda.

Pidana penjara sementara ini diancam pada hampir semua kejahatan (pelanggaran tidak), kecuali kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Walaupun masih ditemukan sejumlah pidana penjara itu diancam sangat singkat, seperti: diancam selama-lamanya tiga minggu (pasal 172 dan 174 KUHP), diancam selama-lamanya satu bulan dua minggu (Pasal 178 KUHP) atau bahkan

ada pidana denda dirumuskan sebagai pidana utama dari kejahatan seperti yang ditentukan dalam Pasal 176 KUHP.

Dilihat dari pola perumusannya (tunggal, alternatif, kumulatif, dan gabungan alternatif-kumulatif), bahwa perumusan pidana penjara sementara ini paling lengkap dibandingkan dengan pola perumusan pidana lainnya. Keempat pola perumusan pidana, yakni tunggal, alternatif, kumulatif, maupun gabungan alternatif-kumulatif didapati dalam perumusan pidana penjara sementara. (Barda Nawawi Arief, 2010)

Perumusan secara tunggal (satu jenis pidana pokok saja yang diancam) didapati antara lain dalam Pasal 338, 353 ayat (1), (2), dan (3), 187-1e, 2e KUHP. Perumusan secara alternatif (lebih dari satu jenis pidana pokok yang diancam secara alternatif, misalnya penjara atau kurungan, atau penjara atau denda) didapati banyak sekali, karena kebanyakan perumusan pidana penjara sementara itu dirumuskan secara alternatif, seperti yang didapati antara lain dalam Pasal 351 ayat (1), 362, 372 KUHP. Perumusan secara kumulatif (dua jenis pidana pokok yang diancam sekaligus) didapati antara lain dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perumusan secara

gabungan alternatif-kumulatif didapati antara lain dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keempat pola perumusan pidana penjara tersebut, dalam KUHP hanya didapati dua pola saja, yakni pola perumusan pidana penjara secara tunggal dan secara alternatif. Adapun yang tersebar di luar KUHP, didapati keempat pola tersebut. Selanjutnya dilihat dari aspek maksimum-minimum, perumusan pidana penjara sementara dalam KUHP hanya menganut pola maksimum khusus-minimum umum, artinya hanya batas lama maksimum penjara sementara itu saja yang ditentukan secara khusus pada tiap-tiap kejahatan, namun tidak dengan batas lama minimumnya. Untuk batas lama minimum setiap pidana penjara itu adalah batas lama minimum umum yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni satu hari. Adapun di luar KUHP, didapati kedua pola, yakni maksimum khusus-minimum umum dan maksimum khusus-minimum khusus. Pola maksimum khusus-minimum khusus adalah pola di mana tidak hanya batas lama maksimum penjara sementara itu saja yang ditentukan pada tiap-tiap kejahatan, namun batas lama minimumnya juga

ditentukan secara khusus pada tiap-tiap kejahatan. Untuk contoh pola perumusan pidana maksimum khusus-minimum khusus ini dapat disebut misalnya yang ditentukan dalam Pasal 47 UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah jenis pidana yang berada pada urutan ketiga dalam urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Sebagai pidana yang berada dalam urutan ketiga, jenis pidana ini tergolong pidana ringan, yang umumnya diancam sebagai pidana utama untuk jenis pelanggaran. Di satu sisi pidana kurungan ini mempunyai kesamaan dengan pidana penjara, walaupun di sisi lain ada pula perbedaannya. Persamaannya dengan pidana penjara adalah pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara, ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni melalui pembatasan kemerdekaan bergerak. Adapun perbedaannya, yang utama tentu adalah dari segi lamanya, pidana penjara itu selama-lamanya sampai dua puluh tahun, bahkan sampai seumur hidup, sedangkan pidana kurungan itu selama-lamanya hanya sampai satu tahun empat bulan. Di samping itu perbedaannya dengan pidana

penjara adalah dari segi pelaksanaan pidana kurungan itu, pelaksanaannya berbeda dengan pidana penjara. (Jur Andi Hamzah, 2012)

Dilihat dari pola perumusannya (tunggal, alternatif, kumulatif, atau gabungan alternatif-kumulatif), pidana kurungan selalu dirumuskan secara tunggal dan secara alternatif. Dalam perumusan secara tunggal, pidana kurungan itu dirumuskan sendirian (tunggal), tidak dialternatifkan atau dikumulatikan dengan pidana lain, misalnya didapati dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2), 505 ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam perumusan secara alternatif, pidana kurungan sebagai pidana utama dialternatifkan dengan pidana denda, misalnya yang didapati dalam Pasal 490, 492 ayat (1), 502 ayat (1) KUHP.

Segi maksimum minimum, perumusan pidana kurungan dirumuskan dengan pola maksimum khusus-minimum umum. Artinya lama maksimum pidana kurungan itu saja yang ditentukan secara khusus dalam tiap-tiap pelanggaran, sedangkan untuk lama minimumnya tidak. Untuk lama minimum tiap-tiap pidana kurungan itu adalah yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, yakni sekurang-kurangnya satu hari.

Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang paling ringan, dalam urutan jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, ditempatkan diurutan keempat (urutan yang terakhir). Pidana denda adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap harta (uang). Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana ini pada umumnya diancam pada pelanggaran. Perumusannya (tunggal-alternatif-kumulatif atau gabungan alternatif-kumulatif), pidana denda selalu dirumuskan secara tunggal, secara alternatif atau secara kumulatif. Dalam hal denda itu dirumuskan sebagai pidana utama, maka pidana denda tersebut dirumuskan secara tunggal, oleh karena tidak ada pidana lainnya yang lebih ringan yang dapat dijadikan sebagai alternatif dari pidana denda, misalnya yang didapati dalam Pasal 489 ayat (1), 490, 491 KUHP. Dalam hal dirumuskan secara alternatif, pidana denda tersebut selalu merupakan alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan.

Pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 281, 362 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 492 ayat (1), 493 KUHP adalah contoh dari

perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam hal denda itu dirumuskan secara kumulatif, denda itu selalu dirumuskan bersama-sama dengan pidana penjara, misalnya yang didapati dalam Pasal 3, 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dilihat dari segi maksimum-minimum, pidana denda itu dirumuskan dengan pola maksimum khusus-minimum umum dan maksimum khusus-minimum khusus. Pola maksimum khusus-minimum umum adalah pola perumusan pidana dengan menentukan batas maksimum denda secara khusus pada tiap-tiap pelanggaran dan tidak untuk batas minimumnya. Untuk batas minimum tiap-tiap pelanggaran tersebut berlaku ketentuan minimum yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.

Adapun pola perumusan maksimum khusus-minimum khusus adalah pola perumusan pidana denda yang tidak hanya menentukan batas maksimum dendanya saja secara khusus pada tiap-tiap pelanggaran, tetapi juga batas minimumnya. Pola perumusan maksimum khusus-minimum umum ini didapati dalam KUHP maupun di luar KUHP,

sedangkan pola maksimum khusus-minimum khusus hanya didapati di luar KUHP, misalnya yang ditentukan dalam Pasal 5, 6 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pola ini tidak didapati di dalam KUHP.

Sebagai pidana yang wujudnya adalah harta (uang), besaran denda itu, khususnya yang terdapat dalam KUHP saat sekarang ini sudah tidak sesuai atau tidak realistis lagi (tidak dengan besaran denda yang terdapat di luar KUHP). Bayangkan misalnya ancaman pidana denda sebagai pidana utama yang ditentukan dalam Pasal 489 KUHP yang sebanyak-banyaknya Rp 900,- atau denda sebagai alternatif dari pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP yang sebanyak-banyaknya Rp 900,- Denda itu tentu saat sekarang ini tidak mungkin lagi untuk diterapkan. Akibatnya apa, akibat yang terparah adalah dalam hal pidana denda itu dirumuskan secara tunggal, di mana denda sebagai satu-satunya pidana yang diancamkan, misalnya pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 489 KUHP, pelanggaran itu menjadi dibiarkan begitu saja atau tidak diproses secara hukum, karena percuma dan sia-sia untuk memprosesnya, diproses pun, pidana yang

dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Masih lebih baik dalam hal denda itu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan, ketidakrealistisan dendanya dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pidana utamanya, yakni pidana penjara atau pidana kurungan, tidak sampai membawa akibat dibiarkannya saja kejahatan/pelanggaran itu tanpa diproses secara hukum. Tetapi itupun sesungguhnya tetap masih merupakan masalah, karena dengan tidak mungkin dijatuhkannya lagi pidana denda itu, menjadikan semua kejahatan/pelanggaran dijatuhkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan sebagai pidana utamanya, walaupun hukum pidana sebenarnya memberi kemungkinan untuk dijatuhkannya pidana denda.

Asas Keselarasan Antara Berat-Ringannya Pidana Dengan Berat-Ringannya Kejahatan atau Pelanggaran

Asas keselarasan adalah berat ringannya pidana yang diancam pada kejahatan atau pelanggaran itu seharusnya selaras dan serasi dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggaran. Pidana berat diancam untuk tindak pidana berat (kejahatan), pidana ringan diancam

untuk tindak pidana ringan (pelanggaran). Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana berat itu dipahami adalah pidana mati dan penjara, yang menempati urutan kesatu dan kedua dalam urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana ringan adalah pidana yang berada pada urutan ketiga dan keempat, yakni pidana kurungan dan denda. (Jur Andi Hamzah, 2012)

Berat ringannya kejahatan atau pelanggaran sendiri dilihat dari berat atau parah yang dapat diakibatkan oleh kejahatan atau pelanggaran itu. Akibat tersebut tentu dapat diperhitungkan dan diperkirakan secara *scientific*. Tindak pidana yang mengakibatkan atau dapat menimbulkan akibat yang berat atau parah yang berat dikategorikan tindak pidana berat (kejahatan), tindak pidana yang menimbulkan akibat atau dapat menimbulkan akibat yang tidak atau kurang parah dikategorikan tindak pidana ringan (pelanggaran). Dalam KUHP diketahui tindak-tindak pidana berat (kejahatan) itu diatur dalam Buku Kedua, yang seharusnya diancam dengan pidana-pidana berat, yakni pidana mati atau pidana penjara dan tindak-tindak pidana ringan (pelanggaran) itu diatur dalam

dengan pidana-pidana ringan, yakni pidana kurungan atau pidana denda.

Semua kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua KUHP itu diancam dengan pidana berat, yakni pidana mati atau pidana penjara, masih ditemukan beberapa kejahatan diancam dengan pidana ringan, seperti pidana denda, misalnya kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 176 KUHP. Begitu pula masih ditemukan sejumlah kejahatan, memang telah diancam dengan pidana penjara, namun lama maksimum penjara yang diancamkan itu sangat singkat, misalnya yang ditentukan dalam Pasal 172 KUHP, maksimum penjara yang diancam tiga minggu.

Menurut hemat penulis, wajar saja memang kalau kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 176 KUHP itu diancam dengan pidana denda, karena akibat atau akibat yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan itu ringan saja, yang menjadi masalah bagi Penulis adalah menempatkan tindak pidana itu dalam kategori kejahatan, seharusnya tindak pidana itu dikategorikan ke dalam pelanggaran, sehingga menjadi selaras antara pidana yang diancam dengan tindak pidananya.

Begitu pula halnya dengan kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 176 KUHP, kalau memang akibat atau akibat yang

dapat ditimbulkan oleh kejahatan itu ringan saja, mengapa harus diancam dengan pidana penjara, kalau penjaranya cuma maksimum tiga minggu, bukankah masih ada jenis-jenis pidana lainnya yang lebih ringan yakni pidana kurungan atau denda? Pidana kurungan saja lama maksimumnya sampai satu tahun (dalam hal-hal tertentu dapat menjadi satu tahun empat bulan), mengapa tidak pidana kurungan itu saja yang diancamkan kalau lama maksimumnya cuma tiga minggu. Menurut hemat penulis lebih tepat hukuman penjara itu diancamkan, kalau lama maksimumnya di atas satu tahun, kalau kurang dari satu tahun, diancam saja dengan pidana kurungan. Bukankah lama maksimum hukuman kurungan itu sampai satu tahun?

Kalau kenyataannya masih ditemukan pidana ringan diancam pada kejahatan, di mana seharusnya pidana berat saja, tidak demikian halnya dengan pelanggaran. Pada pelanggaran tidak ditemukan ada pelanggaran yang diancam dengan pidana berat, yakni pidana penjara apalagi pidana mati, semua pelanggaran telah diancam dengan pidana ringan berupa pidana kurungan atau pidana denda.

Akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan atau pelanggaran dapat

dipahami tentu tidaklah selalu tertentu, seperti matinya orang pada kejahatan terhadap jiwa. Banyak kejahatan atau pelanggaran akan berakibat atau dapat menimbulkan akibat yang tidak tertentu, akibatnya melebar dari akibat terkecil hingga akibat terberat. Penetapan skala atas akibat yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh suatu kejahatan atau pelanggaran ini menurut hemat penulis perlu dibuat dalam kaitan dengan perumusan pidana: tunggal-alternatif-kumulatif ataupun gabungan alternatif-kumulatif maupun dalam perumusan polanya: maksimum-minimum umum atau maksimum-minimum khusus. Dengan adanya skala ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan pidana, bilamana ia dirumuskan secara tunggal, alternatif, kumulatif, ataupun gabungan alternatif-kumulat; bilamana memakai pola maksimum-minimum umum dan maksimum-minimum khusus.

Misalnya dalam hal akibat yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh suatu kejahatan atau pelanggaran itu sudah tertentu, seperti matinya orang pada kejahatan terhadap jiwa, mungkin perumusan pidana secara tunggal tepat dilakukan, namun dalam hal akibat yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh kejahatan/pelanggaran itu tidak tertentu

akan tetapi dapat melebar dari akibat yang terkecil hingga yang terberat, perumusan pidana secara alternatif mungkin lebih tepat. Misalnya dalam kejahatan penganiayaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 KUHP, pidananya diancam secara alternatif, yakni penjara atau denda. Menurut hemat Penulis perumusan pidana dalam Pasal 351 KUHP ini didasarkan kepada pertimbangan akibat yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh penganiayaan itu sendiri yang dapat melebar dari akibat yang terkecil hingga terberat, mulai dari luka atau sakit ringan hingga luka atau sakit parah? Perumusan pidana secara alternatif dalam pasal ini tentu dimaksudkan agar dalam hal penganiayaan itu menimbulkan akibat luka atau sakit parah tersedia kemungkinan untuk menjatuhkan pidana penjara, namun dalam hal penganiayaan itu hanya menimbulkan akibat luka ringan saja, tersedia pula kemungkinan untuk menjatuhkan pidana denda.

Berikut ini adanya asas yang menjelaskan berat ringannya pidana pokok dijatuhkan terhadap pelanggarnya:

Asas berat-ringannya pidana bergantung pada kesalahan

Asas kesalahan adalah berat ringannya pidana yang diancam itu

bergantung pada unsur kesalahan. (Moeljatno, 2008). Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya ada dua bentuk kesalahan, yakni kesengajaan (kesalahan berat) dan kurang hati-hati atau karena kelalaian (kesalahan ringan). Unsur ini senantiasa dirumuskan dalam hukum pidana, baik secara eksplisit maupun secara implisit. (A. Zainal Abidin Farid, 1995)

Berdasarkan asas ini, jenis dan berat-ringannya pidana yang diancam pada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan harus lebih berat dan lama atau banyak daripada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian. Pertanyaannya, sudahkan jenis pidana lebih berat dan lebih lama (berat-ringannya) diancam pada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja daripada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi karena kurang hati-hati/karena kelalaian dalam hukum pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana ditemukan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja telah diancam dengan jenis pidana yang lebih berat dan lebih lama daripada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian.

Asas kemudahan dalam menyesuaikan perumusan pidana itu

Asas kemudahan adalah kemudahan untuk menyesuaikan perumusan pidana itu dalam hal pidana yang dirumuskan itu sudah tidak sesuai atau sudah tidak realistis untuk dijatuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pidana denda yang dirumuskan, khususnya yang terdapat dalam KUHP itu telah usang, sehingga sudah tidak bisa dipakai lagi. Untuk menyesuaikan pidana denda tersebut, dengan kondisi perumusan pidana dalam KUHP saat sekarang ini tidak mudah, karena besaran denda itu dirumuskan secara konkrit dalam tiap-tiap kejahatan/pelanggaran yang mencantumkan pidana denda. Untuk menyesuaikannya harus dengan melakukan perubahan terhadap semua pasal yang mencantumkan pidana denda tersebut (merubah banyak sekali pasal dalam KUHP).

Apa yang ditempuh oleh Tim Penyusun Rancangan KUHP Baru dalam merumuskan pidana denda, menurut hemat Penulis sudah tepat. Pidana denda yang diancam pada tiap-tiap kejahatan/pelanggaran, tidak lagi disebutkan besarannya secara konkrit, akan tetapi yang disebutkan hanyalah kategorinya saja (Kategori I, II, III, IV, V,

atau VI). Besaran denda untuk tiap-tiap kategori itu sendiri disebutkan dalam satu atau beberapa pasal saja dalam Peraturan Umum (Buku Kesatu Konsep RKUHP). Dengan perumusan pidana denda seperti ini, tidak sulit untuk melakukan peyesuaian terhadap besaran denda yang diancam apabila besaran denda tersebut sudah tidak sesuai atau sudah tidak realistis lagi untuk dijatuhkan, untuk menyesuaikannya cukup dengan mengubah satu atau beberapa pasal saja yang menyebutkan besaran denda untuk tiap-tiap kategori denda tersebut. (Barda Nawawi Arief, 2012)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis mengambil simpulan terhadap masalah perumusan pidana dalam Hukum Pidana saat sekarang ini yang selengkapny telah digambarkan pada bagian-bagian sebelumnya, pada dasarnya jenis dan berat-ringannya pidana pokok (mati-penjara-kurungan-denda) yang dirumuskan dalam hukum pidana itu telah selaras dan serasi dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggarannya. Walaupun demikian masih ditemukan, khususnya dalam KUHP, pidana ringan, yakni pidana denda diancamkan sebagai pidana utama bagi tindak pidana yang

dikategorikan sebagai tindak pidana berat (kejahatan), meskipun pada dasarnya pidana penjara itu telah dirumuskan sebagai pidana utama bagi kejahatan, namun masih terdapat sejumlah pidana penjara yang diancamkan itu sangat singkat. Dimana besaran (nilai) denda yang dirumuskan, khususnya dalam KUHP saat sekarang ini sudah usang, sudah tidak sesuai, sudah tidak realistis untuk dijatuhkan (tidak dengan besaran (nilai) denda yang dirumuskan di luar KUHP). Bahhwa perlu kiranya dirumuskan dan disusun dasar-dasar untuk dijadikan prinsip dan asas-asas dalam merumuskan pidana.

Soejono Soekanto, S, (2015), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
Schaffmeister, D, dkk, (2017), *Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Zainal Abidin Farid, A, (1995), *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, J, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia.
Andi Hamzah, J, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
Chazawi, A, (2018), *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke -9.
Kadir Muhammad, A, (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Nawawi Arief, B, (2003), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
_____, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, T, (2011), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia.
Wardi Muslich, A, (2016), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Ke-3.
Soesilo, R, 1986), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia.
Sunggono, B, (2010,) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Pers.